

## IMPLEMENTASI SAKIP DALAM PERENCANAAN STRATEGIS DI DPMPTSP NAKER KOTA MOJOKERTO

**Rachmawati Herdianti Putri**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[rachmawati.19051@mhs.unesa.ac.id](mailto:rachmawati.19051@mhs.unesa.ac.id)

**Tjitjik Rahaju**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

### Abstrak

Pelaporan kinerja secara sistem dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan instansi pemerintah kepada Pemerintah pusat terhadap pencapaian kinerjanya selama 1 periode. Sesuai dengan adanya Perpres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, instansi pemerintah yang juga merupakan perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut dalam penyelenggaraan implementasi SAKIP. Perencanaan strategis menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP juga tercantum dalam peraturan tersebut. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP. Standar-standar pelaksanaan SAKIP tercantum jelas dalam peraturan-peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dalam menentukan perencanaan strategis. Penelitian akan dikaji menggunakan teori model implementasi kebijakan *top-down* menurut Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan sampel informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKIP DPMPTSP NAKER memiliki standar pelaksanaan yang telah tercantum dengan jelas pada dasar hukum yang berlaku. Komunikasi dan adanya sumber daya yang kompeten dan berkualitas sangat penting sehingga dapat mengendalikan implementasi SAKIP dengan baik dan sesuai target. Peran pimpinan dalam mendukung pelaksanaan SAKIP DPMPTSP NAKER dapat berpengaruh pada kinerja instansi. Serta dukungan dari para ahli terhadap pelaksanaan SAKIP juga dibutuhkan demi kestabilan nilai SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto.

**Kata kunci** : Akuntabilitas kinerja; SAKIP; Perencanaan strategis.

### Abstract

Systematic performance reporting in the form of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a form of responsibility carried out by government agencies to the central government for their performance achievements during 1 period. In accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014, government agencies which are also regional apparatuses have an obligation to participate in the implementation of SAKIP. Strategic planning is the basis for implementing SAKIP as well as stated in the regulation. Then it was lowered into PAN-RB Ministry Regulation Number 88 of 2021, the AKIP evaluation was carried out to obtain information regarding the implementation of SAKIP. The standards for implementing SAKIP are clearly stated in these regulations. The purpose of this study was to obtain a description of the implementation of SAKIP at the DPMPTSP NAKER in Mojokerto City in determining strategic planning. The research will be studied using the *top-down* policy implementation model theory according to Van Meter and Van Horn. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collected using observation techniques, interviews, and documentation. Determination of the informant sample using *purposive sampling* and *snowball sampling techniques*. The results of the study show that in the implementation of SAKIP DPMPTSP NAKER has implementation standards which have been clearly stated on the applicable legal basis. Communication and the existence of competent and quality resources are very important so that they can control the implementation of SAKIP properly and on target. The leadership's role in supporting the implementation of SAKIP DPMPTSP NAKER can affect agency performance. As well as support from experts for the implementation of SAKIP is also needed for the stability of the value of SAKIP at DPMPTSP NAKER Mojokerto City.

**Keywords** : Performance accountability; SAKIP; Strategic planning.

### PENDAHULUAN

Akuntabilitas secara umum dapat disebut sebagai suatu pondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik bisa terwujud

apabila dengan adanya sumber daya yang kompeten dan bertanggungjawab atas segala tugas dan kewenangannya. Blagescu & de Las Casas (2005), Bovens (2007), dan O'Dwyer & Unerman (2007)

dalam Aziz, dkk (2015) menyebutkan istilah akuntabilitas merupakan suatu hubungan berdasarkan komitmen beberapa orang guna menunjukkan, meninjau, dan bertanggung jawab atas kinerja, baik hasil yang dicapai sesuai dengan harapan yang telah disepakati. Mahmudi dalam Yusuf, dkk (2021) menambahkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban agen dalam hal ini pemerintah untuk dapat mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktifitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Adapula menurut Aleksovskaja (2021) bahwa akuntabilitas sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Oleh karena itu begitu pentingnya akuntabilitas dalam upaya menjadikan suatu pemerintahan yang *good governance*.

Nilai akuntabilitas sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Menurut Seyselis & Pradana (2021), akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk persyaratan agar bisa dipercaya oleh masyarakat. Menurut Mardhatillah dalam Suardi, dkk (2021), akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Nilai akuntabilitas memiliki kualitas yang berbeda-beda di setiap kota/kabupaten di Indonesia. Dalam memperoleh nilai yang sesuai dengan target tersebut harus melewati proses pelaporan kinerja melalui suatu sistem yang telah ditetapkan guna mempermudah pelaporan yang bersifat universal. Kinerja menurut Suprpto, dkk. (2021) merupakan hasil dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai pemerintah selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya. Hasil kerja harus dipertanggungjawabkan dengan cara melaporkan. Indonesia menerapkan suatu sistem yang digunakan sebagai wadah pelaporan akuntabilitas. Sistem tersebut ialah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP.

Indonesia harus tetap menyelenggarakan sistem pemerintahannya dengan baik. Hingga Presiden menetapkan Perpres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP. Dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Proses pelaporan kinerja yang sudah dilaporkan secara sistem dalam bentuk SAKIP dilanjutkan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Adapun peraturan mengenai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah aktifitas menganalisis secara sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP tidak bisa hanya dikelola oleh salah satu perangkat daerah saja. Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam Imandiar (2021) menyatakan bahwa untuk mencapai nilai target dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang dilakukan seluruh perangkat daerah. Maka dalam perbaikannya tidak cukup jika hanya dilakukan pada satu ruang lingkup atau satu perangkat daerah saja. Sebab dibutuhkannya aspek kolaboratif dan sinergi antara seluruh instansi pemerintah dalam mencapai kinerja pemerintah. Perbaikan manajemen kinerja dalam suatu instansi pemerintah mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Menurut Acim Dartasim dalam Imandiar (2021) selaku penyelenggara bimbingan teknis Kota Mojokerto menyatakan tujuan bimtek adalah untuk meningkatkan implementasi SAKIP dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tabel 1. Predikat SAKIP beberapa kota/Kabupaten tahun 2021

No.	Kota/Kabupaten	Predikat
Jawa Timur		
2.	Kota Batu	B
3.	Kabupaten Tuban	B
4.	Kota Mojokerto	B
Kalimantan Tengah		
4.	Kabupaten Barito Utara	B
8.	Kabupaten Barito Selatan	CC
Sumatera Utara		
11.	Kabupaten Batubara	CC
12.	Kabupaten Dairi	CC

Sumber : Pemerintah Kota Blitar; sumutpos; Protokol dan Komunikasi Kotawaringin Barat, 2022

SAKIP RB Award tahun 2021 yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 ini merupakan suatu acara penghargaan yang menjadi bagian dari evaluasi SAKIP. Pada acara ini disampaikan ada beberapa kota dan kabupaten di Indonesia dengan predikat yang masih perlu ditingkatkan lagi. Dari beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, Kota Mojokerto menjadi salah satu

daerah yang pencapaian nilai akuntabilitas pada tahun 2021 belum sesuai dengan target.

DPMPTSP NAKER (DPMPTSP NAKER) Kota Mojokerto merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang turut menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap perangkat daerah harus ikut serta dalam mengisi sistem tersebut yang nantinya akan diberi penilaian oleh tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya sistem ini dapat memantau kinerja Perangkat Daerah (PD) pada setiap daerah kota atau kabupaten. Kinerja Perangkat Daerah (PD) akan dinilai sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian data yang diinput dalam sistem dengan realisasi kegiatan. Dengan begitu dapat dilihat apakah nilai akuntabilitas kinerja sudah atau belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

Penyebab utama dari belum tercapainya target SAKIP dalam Dwi (2022), M. Hafiz Anando, salah satu tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa ada dua indikator capaian kinerja Kota Mojokerto tahun 2021 yang belum memenuhi syarat. Salah satu dari indikator tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menanggapi hal tersebut Walikota Mojokerto juga menjelaskan sudah berbagai upaya yang dilakukan dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) namun angkanya tak serta merta mengangkat indikator capaian kinerja. Hal yang dikhawatirkan adalah terjadinya *miscommunication* antara Perangkat Daerah (PD) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut hasil evaluasi dalam Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mojokerto tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan diadakannya program-program guna mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seperti salah satunya ialah program *job fair* dengan membuka 2500 lowongan pekerjaan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat berpengaruh juga pada alokasi anggaran. Sehingga peneliti perlu melakukan analisis lebih dalam mengenai adanya indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang belum memenuhi syarat dalam evaluasi SAKIP tahun 2021.

Adapula penyebab lain dari belum tercapainya target SAKIP Kota Mojokerto tahun 2021. Dalam Khoirunnissa (2021) Walikota Mojokerto juga menyebutkan bahwa ada sekitar dua per tiga Perangkat Daerah (PD) belum memahami tentang SAKIP. Sehingga dibutuhkannya kerjasama dan komitmen antar semua Perangkat Daerah (PD) dengan para aktor pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Mojokerto. Kurang koordinasi dan kerjasama antara perangkat daerah di Kota

Mojokerto. SAKIP Kota Mojokerto memiliki keterkaitan dengan nilai SAKIP dari masing-masing perangkat daerah.

Unsur pelaksana dalam kebijakan SAKIP DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto ialah tim pengendalian SAKIP di lingkungan Kota Mojokerto, dan tim pengendalian SAKIP yang terdapat pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Unsur pelaksana tersebut melaksanakan program atau kebijakan yang disebut SAKIP. Sasaran kebijakan tersebut ialah seluruh instansi Pemerintah Kota Mojokerto.

Dilihat dari permasalahan yang terjadi di Kota Mojokerto, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan *top-down* menurut Van Meter dan Van Horn dalam menganalisis data. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan diperlukan guna memberikan fakta bahwa kebijakan memiliki standar dan sasaran dalam pelaksanaannya, interaksi antara aktor pelaksana, adanya sumber daya yang mendukung, komunikasi yang terjadi antar organisasi, dan faktor-faktor lingkungan kebijakan. Adapun enam variabel yang perlu diperhatikan untuk menganalisis implementasi kebijakan diantaranya standar dan sasaran kebijakan; sumber daya yang mendukung; karakteristik organisasi pelaksana; sikap/disposisi para pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait; dan pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP dalam perencanaan strategis pada DPMPTSP NAKER (DPMPTSP NAKER) Kota Mojokerto.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir dalam A. R. Kurniawan et al. (2019) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang meneliti sekelompok manusia, kondisi, objek, sistem pemikiran dan peristiwa yang sedang terjadi. Jenis penelitian menjadi pilihan peneliti karena dalam penelitian ini diperlukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER (DPMPTSP NAKER) Kota Mojokerto.

Pada penelitian ini, Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono dalam Mukhsin et al. (2017) mengatakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu yang bersifat khusus. Menentukan informan yang dianggap paling tahu tentang pelaksanaan SAKIP dalam proses wawancara. *Snowball sampling*

digunakan peneliti untuk meminta rekomendasi atau rujukan informan lainnya kepada informan pertama. Sehingga didapati informan yang meliputi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Sekretaris tim pengendalian SAKIP pada DPMPSTSP NAKER (DPMPSTSP NAKER).

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan SAKIP dalam perencanaan strategis yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan top-down menurut Van Meter dan Van Horn. Teori tersebut terdiri dari standar, sasaran kebijakan, dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; sikap/disposisi para pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan; serta Lingkungan sosial dan politik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Sugiyono dalam Silkyanti (2019) yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian untuk mendapatkan data primer yaitu dengan wawancara dan observasi. Data sekunder berupa bukti dokumentasi, catatan/file, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menurut Miles dan Huberman ada 3 tahap yakni reduksi data yaitu memfokuskan data dan memilah yang tidak perlu, lalu penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk narasi, dan selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto merupakan lokasi penelitian dan sasaran kebijakan. DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto merupakan instansi gabungan dua bidang utama yaitu Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi menjadi empat bidang dalam struktur pemerintahannya diantara :

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal,
2. Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Bidang Tenaga Kerja.

Pada keempat bidang tersebut memiliki program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang. Mayoritas program dan kegiatan yang disusun merupakan kolaborasi antara ketiga bidang diatas. Program dan kegiatan tersebut Program dan kegiatan yang disusun oleh instansi merupakan bentuk realisasi dari konseptual menjadi penerapan nyata dengan cara memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan prima atas penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya

tentang konseptual saja tetapi juga mengenai penerapan. Karena sebaik apapun konsep pelayanan, apabila tidak dapat diterapkan, maka tidak akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pelayanan yang berkualitas dalam suatu organisasi hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh konsep yang matang. Mengingat saat ini masih seringkali muncul fenomena belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat di Kota Mojokerto.

### 1. Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan

Sasaran kebijakan SAKIP adalah Perangkat Daerah itu sendiri. Perangkat Daerah dalam hal ini menjadi aktor pelaksana (implementor) dan juga sasaran dari kebijakan. Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP mencantumkan Pasal 4 yang berisi bahwa : “SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ialah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.”

Perpres tersebut ditindalanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini menjelaskan pada Pasal 3 yang berbunyi : “Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.”

Sehingga dalam hal ini perangkat daerah merupakan penyelenggara dan juga sasaran kebijakan. Peraturan Kementerian tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah masing-masing dengan mengeluarkan Perwali dalam hal ini merupakan Perwali Mojokerto. Peraturan tersebut memiliki bahasan yang sama dengan peraturan kementerian mengenai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kebijakan ialah DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto.

Implementasi SAKIP pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto merupakan kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk melaporkan hasil kinerja dan mempertanggungjawabkannya. Menurut Ibu Lail, salah satu tim pengendalian SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto mengatakan :

“SAKIP itu hal yang kita lakukan secara berkala dan yang dikerjakan ya itu itu terus. Jadi kita itu setiap tahunnya diharuskan melaksanakan SAKIP, jadi ini adalah bentuk tanggungjawab dinas yang harus dilaporkan.

Kinerja kita setiap tahunnya dinilai dan harus menunjukkan progres. Untuk lebih jelasnya mbak bisa lihat di PERMENPAN RB, implementasi SAKIP kita berpedoman pada aturan itu.” (Wawancara pada 16 Desember 2022)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Mojokerto, Kota Mojokerto memiliki sasaran dan prioritas dalam proses pembangunan daerah. Di mana dalam pembangunan daerah pelaksanaannya sesuai dengan Visi dan Misi Kota Mojokerto. Diwujudkan dalam bentuk suatu indikator-indikator sasaran, tujuan, hingga adanya program kegiatan pada setiap perangkat daerah. Hal tersebut yang nantinya akan memunculkan timbal balik dalam bentuk pelaporan kinerja yang akan dilaporkan oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto kepada pusat. Pada pelaksanaannya diperlukan koordinasi antara perangkat daerah dalam proses pelaporan dalam SAKIP.

Dalam Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, telah direalisasikan dengan adanya kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022, dan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Adapun rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari penjabaran cita-cita Kota Mojokerto yang tertuang dalam visi Kota Mojokerto.

Visi dan Misi Kota Mojokerto pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto terdapat keterkaitan dengan pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Jika dilihat dari Misi Kota Mojokerto, pelaksanaan program yang dilakukan oleh DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto mengemban tiga misi utama, diantaranya :

- Misi ke 3 Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat
- Misi ke 4 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.
- Misi ke 6 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan.

Adanya linearitas visi misi dengan program dan kegiatan yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Berikut pernyataan oleh Ibu Lail selaku tim penyusun SAKIP pada DPMPTSP NAKER :

“Pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP NAKER memang memiliki keterkaitan, ada pada Misi Kota yang nomor 3 dimana dalam RPJMD

terdapat indikator sasaran yaitu nilai SAKIP untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani. Pada indikator tersebut selanjutnya diturunkan menjadi renstra perangkat daerah dengan indikator yang sama. Misi 6 mengenai peningkatan ekonomi dengan indikator sasaran nilai realisasi investasi. Lalu ada juga keterkaitan misi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TKP), terletak pada Misi 6 dimana pada RPJMD terdapat indikator sasaran berupa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kemudian diturunkan menjadi renstra perangkat daerah dengan indikator presentase penyerapan tenaga kerja.” (Wawancara pada 16 Desember 2022)

Ketiga misi tersebut memiliki peran penting dalam ketercapaian target pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan berbasis elektronik. DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto menggunakan ‘e-SAKIP’ untuk melaporkan kinerjanya kepada tim evaluator Kota Mojokerto. Penetapan tim evaluator tercantum dalam Perwali Nomor 53 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat (2), tim evaluator terdiri dari 3 instansi yaitu Bappedalitbang, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

#### 1. Isu-Isu Strategis

Terdapat pula isu strategis dalam hal ini berkaitan dengan kelemahan yang ada pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Masalah pokok yang menjadi kelemahan adalah rendahnya pelayanan perizinan, rendahnya pertumbuhan investasi, dan terbatasnya kesempatan kerja. Dari masing-masing masalah pokok dapat dibuat dan dijabarkan menjadi masalah dan akar masalah.

Tabel 2. Pemetaan Permasalahan

Strategis	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi bagi peningkatan kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja.</li> <li>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia</li> <li>3. Peningkatan pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset</li> </ol>
Meningkatnya kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koodinasi bagi peningkatan investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan, iklim investasi, promosi, dan kerjasama investasi</li> <li>2. Percepatan waktu pengurusan perizinan investasi</li> <li>3. Percepatan waktu dan meminimalkan jumlah prosedur untuk memulai usaha</li> </ol>
Meningkatnya kesempatan kerja terutama di sector informal serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta berjiwa wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan daya saing pencari kerja.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku</li> </ol>

Sumber : (DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2022

Sehingga menghasilkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perizinan yang didukung dengan teknologi informasi.

2. Peningkatan program pendukung peningkatan investasi dengan melakukan promosi investasi yang lebih memadai.
3. Peningkatan program program pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja.
4. Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5. Pengawasan norma ketenaga kerjaan dan hubungan industrial agar menjadi lebih kondusif.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategis dan arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah tugas dan fungsi DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dengan cara menghubungkan strategi kepada sasaran lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target tujuan sasaran sesuai dengan visi dan misi Walikota.

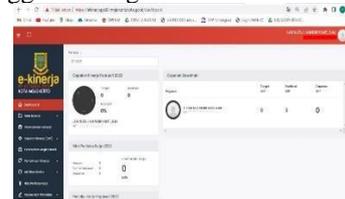
Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Masalah Pokok	Akar Masalah
Rendahnya Pelayanan perizinan	Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan; pemanfaatan teknologi infoemasi yang rendah; rendahnya kompetensi petugas layanan
Rendahnya pertumbuhan investasi	Belum dikenalnya potensi investasi; rendahnya daya tarik investasi; kurangnya promosi investasi; regulasi yang berbelit
Belum optimalnya kualitas pelatihan kerja dan kemudahan akses dalam perluasan kesempatan kerja terutama usia produktif	Rendahnya kualitas tenaga kerja; kurang optimalnya pelayanan pempatan kerja
Belum optimalnya peningkatan hubungan industrial yang kondusif	Terdapat perselisihan hubungan industrial

Sumber : (DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2022)

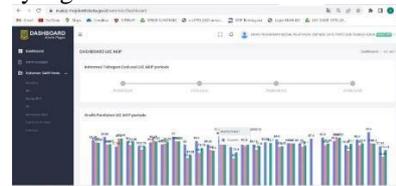
DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja. Sehingga dalam penelitian ini akan mengambil studi pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto.

Setelah penyusunan perencanaan strategis dilanjutkan dengan pengukuran Kinerja dilakukan oleh seluruh instansi Pemerintah Kota Mojokerto dengan menggunakan aplikasi ‘e-Kinerja’. Aplikasi e-Kinerja dapat diakses oleh setiap pegawai pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja dapat diukur juga melalui terlaksananya realisasi anggaran dengan baik.



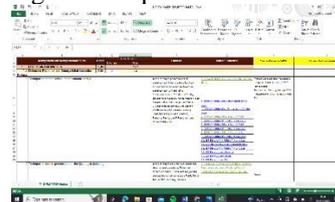
Gambar 1. Aplikasi e-Kinerja (Sumber : DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2023)

Pelaporan Kinerja dilakukan oleh DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dengan menyerahkan laporan kinerja yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan realisasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja diisi dan dilaporkan berbasis elektronik menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi yang disebut ‘e-SAKIP’.



Gambar 2. Aplikasi e-SAKIP (Sumber : DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2022)

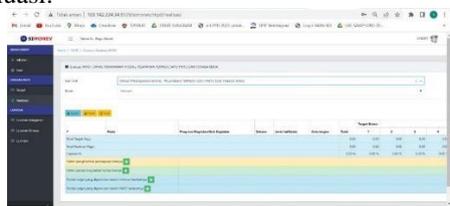
Pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam e-SAKIP. Sehingga dalam pelaksanaannya seluruh perangkat daerah wajib mengisi dan melengkapi data dukung sesuai dengan variabel-variabel yang tersedia pada sistem.



Gambar 3. LKE SAKIP (Sumber : DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2022)

Setelah dilakukan pelaporan ada proses selanjutnya yang disebut evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja juga merupakan bagian dari implementasi SAKIP dalam menentukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama periode satu tahun. Evaluasi ini dilakukan guna mengetahui

seberapa jauh pencapaian dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Evaluasi dan monitoring dilakukan berbasis elektronik seperti tercantum pada Perwali Mojokerto Pasal 4 ayat (3), dalam hal ini menggunakan aplikasi ‘SIMONEVA’ yang merupakan singkatan dari Sistem Monitoring dan Evaluasi.



Gambar 4. SIMONEVA

(Sumber : DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2022)

Hasil evaluasi SAKIP akan diterbitkan LHE setiap perangkat daerah. LHE tersebut selanjutnya akan direkap dan disampaikan secara transparan melalui website Pemerintahan Kota Mojokerto. Berikut data yang menunjukkan hasil penilaian beberapa perangkat daerah :

Tabel 4. Hasil Evaluasi SAKIP beberapa PD

Perangkat Daerah	Predikat	
	2021	2022
Sekretariat Daerah	A	A
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB	A
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A	BB
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	A
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	A
Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	A
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	BB	A
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	A

Sumber : Website Kota Mojokerto, 2022

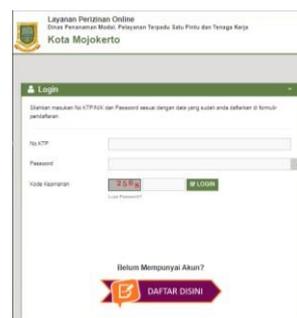
Dalam pencapaian target predikat SAKIP dipengaruhi pula oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Bidang penanaman modal ini mengemban misi keempat untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan pertumbuhan investasi daerah. DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto mengupayakan realisasi kinerja Bidang Penanaman Modal dengan pencapaian minimal memenuhi target yang ditentukan. Target tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan investasi pada Kota Mojokerto.

Bidang Penanaman Modal DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto memiliki pencapaian yang sesuai target. Dilihat dari realisasi kinerja Tahun 2022 tersebut, pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sub kegiatan pembinaan penanaman modal belum sesuai dengan target kinerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Lail DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto :

“Di bidang ini memang ada beberapa yang belum tercapai. Realita kan gak sesuai ekspektasi ya. Tapi itu udah lebih dari cukup, kita juga sudah mengusahakannya. Lagipula tidak semua masyarakat minat dengan adanya pembinaan penanaman modal, tapi kita terus mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Mojokerto.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023)

Walaupun ada beberapa yang belum sesuai target, tidak menjadi masalah bagi Bidang Penanaman Modal untuk terus memberikan berbagai inovasi dalam bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan kepada publik. Peningkatan yang signifikan pada beberapa poin, dikarenakan adanya perkembangan inovasi guna implementasi penanaman modal Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penanaman Modal memiliki inovasi sistem aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan perizinan dan non perizinan.

Si Mojo berisi seluruh pelayanan perizinan online yang merupakan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal. Dalam Si Mojo memberikan banyak pelayanan perizinan mendirikan pembangunan, surat izin kerja tenaga medis, dan juga izin sewa tempat. Pengurusan perizinan ataupun non perizinan penting dilakukan. Memakai fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Kota Mojokerto, mewajibkan pengguna untuk mengurus perizinan. Adapun jika masyarakat yang tidak melakukan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pihak DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dan Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa pengegelan materi reklame sampai batas waktu tertentu.



Gambar 5. SiMOJO

(Sumber : Website DPMPTSPNAKER Kota Mojokerto, 2023)

Adapula sistem pendukung pelayanan lainnya seperti perizinan berusaha dan jempol mempesona memiliki kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan usaha-usaha dan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto. Kedua pelayanan tersebut saling berkaitan. Perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) merupakan perwujudan dari undang-undang Cipta Kerja dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

mengurus izin, khususnya Usaha Mikro Kecil. Dalam pelaksanaannya yang merupakan inovasi baru pendukung pelayanan publik diperlukan sosialisasi implementasi perizinan berusaha (OSS) berbasis resiko.



Gambar 6. OSS

(Sumber : Website DPMPTSPNAKER Kota Mojokerto, 2023)

Perizinan berusaha didukung dengan program inovasi bernama Jempol Mempesona atau Jemput Bola Memberikan Pelayanan Sistem OSS (NIB) tanpa biaya alias gratis. Jempol Mempesona dilaksanakan guna membantu para pengusaha UMKM untuk mendapatkan indentitas pengusaha yaitu NIB. Pelaku usaha yang memiliki NIB akan mempermudah untuk mendapatkan prioritas bantuan.



Gambar 7. Jempol Mempesona

(Sumber : Instagram DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2023)

Pelaksanaan Jempol Mempesona diadakan bergiliran pada setiap daerah di Kota Mojokerto. Perlunya melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat bahwa telah diadakan pelayanan gratis perizinan berusaha. Menurut Walikota Mojokerto dalam salah satu wawancara mengenai pelaksanaan Jempol Mempesona pada website DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, dilakukannya jemput bola secara bergiliran memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat secara masif bahwa ada pelayanan gratis untuk mengurus perizinan berusaha yaitu NIB.

Selanjutnya Bidang Tenaga Kerja DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dalam realisasi kinerjanya. Bidang Tenaga Kerja mengemban misi keenam, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan memiliki tujuan meningkatkan akses masyarakat dalam membangun kesetaraan dengan cara menurunkan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Indeks Gini merupakan tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Mojokerto. Pendapatan penduduk yang menurun akan memperlebar ketimpangan antara penduduk miskin dan non miskin.

Beberapa progam kegiatan yang terlaksana seperti kegiatan pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang telah dilaksanakan ialah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan juga mini job fair. Pelatihan kerja berbasis kompetensi misalnya pelatihan kerja tata kecantikan wajah. Pelatihan kerja ini diikuti peserta untuk meningkatkan skill mereka dalam bidangnya masing-masing, dalam hal ini bidang tata rias.



Gambar 8. Kegiatan Pelatihan Kerja

(Sumber : Instagram DPMPTSPNAKER Kota Mojokerto, 2023)

Adapula kegiatan mini job fair yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja guna memperluas kesempatan masarakat usia produktif untuk mendapat pekerjaan sesuai bidang yang ditekuni. Pemerintah Kota Mojokerto khususnya DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto sebagai penyelenggara kegiatan menyediakan berbagai macam lowongan pekerjaan bagi lulusan SMA, Diploma, ataupun Sarjana. Diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pembangunan Kota Mojokerto.



Gambar 9. Mini Job Fair

(Sumber : Instagram DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesimpulan pada indikator sasaran, standar, dan tujuan kebijakan telah tercantum dalam dasar kebijakan SAKIP yaitu Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan terdapat aktor pelaksana (implementor) yang terlibat di dalamnya. Implementor kebijakan SAKIP adalah seluruh perangkat daerah Kota Mojokerto. Dalam pelaksanaan SAKIP, Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan untuk membentuk tim pengendalian di setiap daerah masing-masing dan perangkat daerahnya. Pembentukan tim pengendalian

dilakukan dengan tujuan memudahkan proses pelaporan kinerja instansi pemerintah oleh aparatur terpilih. Pembentukan tim pengendalian tercantum dalam Surat Keputusan Kepala DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto Nomor 188.4/16/417.514.4/2022. Tim tersebut terdiri dari :

Ketua : Kepala Dinas  
Wakil ketua : Sekretaris  
Sekretaris : Perencana Ahli Muda  
Anggota : Kepala Bidang dan staf terpilih lainnya.

Tim pengendalian SAKIP DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto dalam menjalankan tugasnya akan melakukan berbagai macam koordinasi. Koordinasi dilakukan dalam sebuah forum rapat. Rapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi dalam merevisi atau mereviu dokumen pendukung yang berkaitan dengan SAKIP. Pada periode baru pelaksanaan SAKIP, instansi akan mengadakan rapat staf untuk membahas pemenuhan data dukung setiap komponen.



Gambar 10. Rapat Tim Pengendalian SAKIP  
(Sumber : DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2023)

Dalam pelaksanaan SAKIP diharapkan DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto fokus pada kinerja, menggunakan anggaran secara efisien. Efisiensi anggaran perlu dilakukan guna menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari program dan kegiatan yang tidak penting, anggaran yang digunakan hanya untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat. Berikut pernyataan Ibu Lail :

“Terdapat sumber daya finansial dalam pelaksanaan SAKIP sendiri yaitu alokasi anggaran. Bagaimana kita harus memanfaatkan alokasi anggaran yang ada dan dapat menghasilkan outcomes yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Alokasi anggaran ini yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan itu. Pemerintah harus pintar-pintar dalam pengelolaan anggaran, agar dapat mencegah permasalahan pada pengelolaan anggaran seperti terbatasnya jumlah anggaran atau kegiatan yang terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Pokoknya dana yang didapat harus diatur jangan sampe ada pembengkakan dana. Atao biasanya kalo dana nya kurang kita juga ngurangi program kegiatan supaya efisien juga. Kita merencanakan program kegiatan

diharapkan dapat mencapai tujuan instansi.”  
(Wawancara pada 13 Desember 2022)

Sehingga sumber daya sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini ialah implementasi SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Pelaksana atau aktor kebijakan yang kompeten dapat mengatur finansial dengan baik dan dapat mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil serta mengurangi pemborosan anggaran.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

DPMPTSP NAKER memiliki aplikasi pelayanan publik online yang terdapat dalam website resmi DPMPTSP NAKER. Pada website ini terdapat berbagai pelayanan yang ditawarkan mengenai perizinan dan investasi. Terdapat pula laman pengaduan online sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta masyarakat bisa mengisi survey kepuasan masyarakat. Berikut pernyataan Ibu Lail tim pengendalian SAKIP DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto :

“Kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin melalui website pelayanan publik DPMPTSP NAKER, di website itu banyak menawarkan berbagai bentuk pelayanan mengenai perizinan. Kita juga memberikan kebebasan masyarakat untuk memberikan penilaian tentang pelayanan yang kita berikan. Alhamdulillah untuk tahun terakhir kita dapet lumayan bagus jadi harapannya pelayanan yang kami berikan semaksimal mungkin tidak sia-sia.” (Wawancara pada 13 Desember 2022)

Jika dikaitkan dengan struktur birokrasi pada instansi pemerintahan, pelaksanaan SAKIP memiliki keterkaitan karena peran pimpinan sangat penting disini. Dalam pelaksanaannya, dibentuk suatu tim pengendali SAKIP yang diharapkan lebih memahami dan dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja tersebut. Berikut pernyataan Ibu Lail dari DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto :

“Struktur birokrasi memiliki pengaruh dengan pelaksanaan SAKIP ini, seperti peran pemimpin, kepala dinas lalu peran para kepala bidang. Meraka ikut andil dalam mengendalikan SAKIP perangkat daerah. Setiap kepala bidang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program sesuai dengan bidang masing-masing. Program-program tersebut sebagai cara untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi-misi.” (Wawancara pada 13 Desember 2022)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. Jajaran struktur mulai

kepala dinas hingga anggota memiliki peran masing-masing dalam implementasi kebijakan SAKIP.

#### 4. Sikap/Disposisi para Pelaksana

Semua kegiatan yang diselenggarakan pasti tidak lepas dari monitoring yang dilakukan oleh Walikota Mojokerto. Monitoring dilakukan demi lancarnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Salah satu kegiatan monitoring yang dilakukan ialah monitoring pelatihan Tenaga kerja dan produktifitas kerja. Dalam monitoring, Walikota Mojokerto menyampaikan bahwa pelatihan tenaga kerja sangat penting agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Masyarakat usia produktif diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang unggulannya.

Adapula kegiatan kunjungan pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Pendampingan ini dilakukan untuk mengarahkan dan menyusun laporan hasil kegiatan penanaman modal yang telah dilaksanakan satu tahun terakhir. Menurut Ibu Lail selaku Tim Pengendalian SAKIP DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto mengatakan :

“Kegiatan kunjungan ini kita lakukan kayak pemantauan sama ngasih arahan terus kita lihat bagaimana perkembangan investasi dan kegiatan UMKM mereka. Yang nantinya akan dijadikan laporan kegiatan akhir tahun.”  
(Wawancara tanggal 27 Februari 2023)



Gambar 11. Kunjungan Pendampingan  
(Sumber : Instagram DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto, 2023)

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sikap/disposisi para pelaksana kebijakan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto mampu memberikan dukungan dalam bentuk monitoring dan pengarahan. Peran pemimpin dalam memberikan monitoring sangatlah penting demi terlaksananya kebijakan sesuai dengan dokumen Perencanaan Strategis.

#### 5. Komunikasi antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan Pelaksanaan

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP tahun 2021 menunjukkan adanya ketidakselarasan nilai yang diperoleh. Dimana dalam hasil penilaian SAKIP perangkat daerah tidak dapat mengangkat nilai SAKIP Kota Mojokerto. Dalam hal ini, pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah seharusnya berpengaruh pula pada pencapaian nilai akuntabilitas milik Kota Mojokerto. Menurut salah

satu informan penelitian, seluruh Perangkat Daerah sudah mengikuti pelaksanaan SAKIP dengan ketentuan yang berlaku namun untuk penilaian akhir semuanya diserahkan kembali kepada tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut Pernyataan Ibu Heni terkait hal tersebut :

“Untuk pencapaian SAKIP Perangkat Daerahnya bagus ya, tapi untuk SAKIP Kota belum mencapai target. Mengapa bisa terjadi seperti itu, menurut saya sebagai salah satu tim pengendalian SAKIP untuk kota, kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Saat perangkat daerah sudah melaporkan laporan kinerjanya kepada kami, lalu kami memberikan penilaian dan melakukan evaluasi, menurut penilaian kami sudah bagus dalam kinerjanya. Setelah itu kami akan membuat laporan kinerja yang dinilai oleh tim evaluator Kementerian PAN-RB. Ternyata hasil penilaian, Kota Mojokerto hanya dapet B, mungkin ada beberapa perbedaan standar/kriteria penilaian dari tim evaluator, jadi walaupun sudah bagus menurut kita tapi belum tentu bagus menurut kementerian.”  
(Wawancara pada 16 Desember 2022)

Implementasi kebijakan SAKIP memiliki berbagai proses dan melibatkan berbagai aktor sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya komunikasi didalamnya. Komunikasi dan juga koordinasi antara para aparatur dalam tim pengendalian sangat penting. Komunikasi dilakukan pada internal dan juga eksternal instansi. Pada eksternal instansi, para pimpinan termasuk Walikota Mojokerto biasanya akan mengadakan rapat besar bersama seluruh kepala dinas dan badan untuk membahas mengenai pelaksanaan SAKIP. Pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto komunikasi internal dilakukan pada saat rapat internal pengarahannya pelaksanaan SAKIP. Biasanya setelah melakukan rapat internal, kepala DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto akan mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti arahan dari Walikota Mojokerto. Rapat internal dilakukan bersama staf-staf tim pengendalian SAKIP DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto.

#### 6. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Politik

Dalam proses implementasi, ada beberapa pengaruh-pengaruh yang berasal faktor eksternal instansi yaitu dari lingkungan sosial dan politik. Misalnya adanya pengaruh elit politik dan pengaruh hubungan-hubungan sosial seperti kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Jika dilihat dari perencanaan strategis hingga evaluasi akuntabilitas bahkan penilaian akuntabilitas kinerja, peneliti menemukan satu keterlibatan elit politik di dalamnya, yaitu terjadi ketika proses pembinaan atau biasa yang disebut bimbingan teknis setelah penilaian akuntabilitas kinerja. Tim pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) akan memanggil mentor dari kementerian atau dari seorang ahli yang dianggap mampu memberikan arahan untuk menindaklanjuti hasil penilaian akuntabilitas kinerja. Berikut pernyataan dari Ibu Heni Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto :

“Setelah penilaian SAKIP 2021 kami mendatangkan seorang ahli yang merupakan seorang guru besar Universitas Brawijaya untuk melakukan bimbingan teknis. Dari hasil evaluasi SAKIP 2021, ada 2/3 perangkat daerah di Kota Mojokerto yang belum memahami SAKIP dan juga ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi sehingga perlu mendatangkan ahli dalam bimbingan teknis ini. Nanti selanjutnya kita akan melakukan rapat gabungan bersama perangkat daerah juga untuk melakukan pengarahan.” (Wawancara pada 16 Desember 2022)

Selain itu pelaksanaan SAKIP memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketercapaian nilai akuntabilitas kinerja Kota Mojokerto. Ketercapaian nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa kinerja instansi dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik atau tidak. Hasil wawancara oleh peneliti, ditemukan adanya perbedaan capaian nilai akuntabilitas perangkat daerah Kota Mojokerto dan akuntabilitas kinerja Kota Mojokerto. Ibu Lail menjelaskan bahwa pencapaian kinerja pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto berpengaruh kepada respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut pernyataan Ibu Lail terkait hal tersebut:

“Dari hasil capaian kinerja kami tahun 2021, dinas mendapatkan nilai BB, sesuai dengan itu kami mengumpulkan data berdasarkan kejadian yang ada. Alhamdulillah, kami mengalami kemajuan untuk tahun 2022 dinas mendapat nilai A karena bagaimanapun kami diharuskan menindaklanjuti capaian SAKIP pada tahun sebelumnya untuk diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Untuk nilai SAKIP perangkat daerah bagus bagus, jadi menurut saya untuk pelayanan publiknya juga sudah bagus namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.” (Wawancara pada 16 Desember 2022)

Pernyataan tersebut juga sependapat dengan ibu Heni Rusmawardani yang menyatakan bahwa capaian akuntabilitas kinerja yang baik merupakan gambaran dari kualitas pelayanan publik yang baik. Lalu berbeda lagi dengan untuk permasalahan mengenai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021 yang belum mencapai target. Dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kota Mojokerto yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

menunjukkan bahwa dari banyaknya poin yang harus diperbaiki, sebagian besar mengenai sikap para pelaksana dalam proses implementasi dan juga beberapa indikator SAKIP yang belum memenuhi syarat. Hasil Evaluasi tersebut bertolak belakang dengan capaian nilai SAKIP perangkat daerah. Berikut pendapat dari Ibu Heni Rusmawardani :

“Tim evaluator kementerian memiliki cara sendiri dalam menentukan nilai akuntabilitas, kami sudah yakin bahwa akuntabilitas kinerja Kota Mojokerto sudah bagus jika dilihat dari capaian SAKIP perangkat daerahnya. Kami juga mengusakan untuk selalu mempertahankan pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang masih perlu diperbaiki. Semua itu kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.” (Wawancara pada 16 Desember 2022)

Peningkatan akuntabilitas kinerja tetap harus dilakukan walaupun capaian nilai akuntabilitas sudah tercapai atau bahkan melampaui target yang ditentukan. Namun sejalan dengan melakukan peningkatan, seluruh instansi Pemerintah Kota Mojokerto diharuskan menyelaraskan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pula DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto. Membangun pemerintahan yang transparansi, akuntabel dan mandiri merupakan salah satu perwujudan Visi dan Misi Kota Mojokerto.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam implementasi SAKIP dalam perencanaan strategis pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto merujuk pada Perpres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Kemudian Peraturan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi SAKIP pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SAKIP DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto memiliki standar yang jelas tercantum dalam Perwali Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Standar-standar akuntabilitas kinerja tercantum jelas dalam peraturan tersebut.

Implementasi SAKIP DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto memerlukan sumber daya manusia dan non manusia yang berkualitas. Kualitas pegawai sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan SAKIP DPMPSTSP NAKER

Kota Mojokerto. Peran penting Kepala Dinas dalam memberikan pengarahan dan monitoring sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan SAKIP pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto.

Pelaksanaan SAKIP DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto menjunjung tinggi komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan internal. Meskipun ada beberapa hambatan namun indikator tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan SAKIP pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto masih ada. Terjadi *miscommunication* pada beberapa aparatur, namun permasalahan tersebut dapat teratasi dengan adanya pemimpin dinas yang *caring* dan para aparatur yang saling mendukung. Kepala dinas yang memberikan motivasi dan dukungan penuh dalam implementasi program dan kegiatan DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto.

Adapula hambatan mengenai pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan masih ada yang kurang tepat, namun hal tersebut teratasi dengan adanya pembinaan dan pengarahan oleh kepala dinas maupun kepala daerah dan juga terbentuk tim pengendalian SAKIP yang terdiri dari aparatur- aparatur yang memiliki kompetensi baik sehingga dapat mengontrol pelaksanaan kebijakan. Dukungan dari para ahli dan Kepala Daerah yang positif terhadap pelaksanaan SAKIP sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara tak langsung membantu melancarkan implementasi kebijakan SAKIP dinas bersangkutan.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan SAKIP dalam Perencanaan Strategis pada DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto telah mencapai target kinerja yang baik dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Visi dan Misi Kota Mojokerto.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat pula saran-saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Untuk seluruh Perangkat Daerah dapat meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan melalui bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan SAKIP di Kota Mojokerto.
2. Selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik secara internal ataupun eksternal, secara horizontal maupun vertikal agar tercipta hubungan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan mengenai urusan pemerintahan internal.
3. Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPSTSP NAKER untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan juga mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Mojokerto.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aleksovska, M. (2021). Accountable for What? The Effect of Accountability Standard Specification on Decision-Making Behavior in the Public Sector. *Public Performance and Management Review*, 44(4), 707–734. <https://doi.org/10.1080/15309576.2021.1900880>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- DPMPSTSP NAKER Kota Mojokerto. (n.d.). *Dokumen Perubahan Rencana Strategis*.
- Dwi. (2022, September 21). *Evaluasi SAKIP Kota Mojokerto, Kemenpan RB Atensi Dua Indikator Capaian Kinerja*. Surabayaapagi.Com. <https://surabayapagi.com/read/evaluasi-sakip-kota-mojokerto-kemenpan-rb-atensi-dua-indikator-capaian-kinerja>
- Imandiar, Y. P. (2021, September 29). *Pemkot Mojokerto Targetkan SAKIP 2021 Bisa Dapat Nilai "BB."* DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5745034/pemkot-mojokerto-targetkan-sakip-2021-bisa-dapat-nilai-bb>
- Khoirunnissa, J. (2021, December 24). *Dongkrak Nilai SAKIP, Walkot Mojokerto: Harus Keluar dari Zona Nyaman*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5869710/dongkrak-nilai-sakip-walkot-mojokerto-harus-keluar-dari-zona-nyaman>
- Kurniawan, A. R., Chan, F., Abdurrohman, M., Wanimbo, O., Putri, N. H., Intan, F. M., & Samosir, W. L. S. (2019). PROBLEMATIKA GURU DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM LITERASI DI KELAS IV SEKOLAH DASAR PENDAHULUAN Pelaksanaan pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia . Menurut UU No . 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidik. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, III(2), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/eds.v3n2.p31-37>
- Mukhsin, R., Mappigau, P., & Tenriawaru, A. N. (2017). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar. *Jurnal Analisis*,

- 6(2), 188–193.  
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ef79bd330d16ba9fda32510e0a581953.pdf>
- Pemerintahan Kota Blitar, S. R. (2022, April 5). *Kota Blitar Pertahankan Predikat Sangat Baik pada Penilaian SAKIP Tahun 2021 / Kota Blitar*. Admin@blitarkota.Go.Id.  
<https://blitarkota.go.id/id/berita/kota-blitar-pertahankan-predikat-sangat-baik-pada-penilaian-sakip-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202221/permen-pan-rb-no-88-tahun-2021>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. In *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* (pp. 1–44).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>
- Protokol dan Komunikasi Kotawaringin Barat. (2022, April 5). *Kementerian PANRB Umumkan Laporan Hasil Evaluasi melalui SAKIP dan RB Award 2021*. Multimedia Center Kotawaringin Barat.  
<https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/kementerian-panrb-umumkan-laporan-hasil-evaluasi-melalui-sakip-dan-rb-award-2021>
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Publika*, 37–48.  
<https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48>
- Silkyanti, F. (2019). Analisis Peran Budaya Sekolah yang Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(1).  
<https://doi.org/10.23887/ivcej.v2i1.17941>
- Suardi, Nazirwan, & Fitriani. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019* (Vol. 1, Issue 2, pp. 31–37).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jiee.v1i2.415>
- sumutpos. (2022, September 30). *Tertinggi di Kabupaten/Kota se-Sumut, Humbahas Pertahankan SAKIP Award Predikat BB / SumutPos*. SumutPos.Co.  
<https://sumutpos.jawapos.com/daerah/06/04/2022/tertinggi-di-kabupaten-kota-se-sumut-humbahas-pertahankan-sakip-award-predikat-bb/>
- Suprpto, Suparji, Harianto, S., Palupi, A. E., & Samsul, S. I. (2021). Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Selama Work From Home ( Wfh ): *Journal of Public Sector Innovations*, 05(2), 90–99.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p90-99>
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77.  
<https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>
- Website DPMPPTSP NAKER Kota Mojokerto  
Portal DPMPPTSP Mojokerto  
[mojokertokota.go.id](http://mojokertokota.go.id)
- Instagram DPMPPTSP NAKER Kota Mojokerto  
<https://instagram.com/dpmpptspnakerkotamojokerto?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>

